

ANALISIS POTENSI PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PEDAGANG DI KOTA

LANGSA

Nurjanah

IAIN Langsa, nurjannah@iainlangsa.ac.id

Abstract

The study aims to look at the potential and barriers to non-cash payments in Langsa City. Using qualitative methods and the number of respondents as many as 6 people. The results of this study show that the city of Langsa has great potential in the application of non-cash payments along with the rapid increase of merchant development in the city of Langsa, and in the application has several obstacles including frequent network errors, lack of socialization about the use of digital transactions.

Keyword: Non Cash Payments, E-Money

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi dan hambatan pembayaran non tunai di KotaLangsa. Menggunakan metode kualitatif dan jumlah responden sebanyak 6 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kota langsa memiliki potensi yang besar dalam penerapan pembayaran non tunai seiring dengan meningkat pesat perkembangan pedagang di kota Langsa, dan dalam penerapan tersebut memiliki beberapa penghambat diantaranya seringnya terjadi jaringan error, kurangnya sosialisasi tentang penggunaan transaksi digital.

Kata kunci: Pembayaran Non Tunai, E-Money

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan ekonomi, sistem pembayaran merupakan hal yang sangat urgen sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara. Undang-undang Bank Indonesia nomor 6 tahun 2009 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Penerapan sistem pembayaran dari tunai menjadi non tunai dapat

disebut sebagai revolusi sosial akibat modernisasi. Teknologi dan informasi saat ini memiliki perkembangan yang sangat pesat, salah satunya pada bidang ekonomi, seperti pada sistem pembayaran. Terbukti dengan semakin pesatnya teknologi internet, akan semakin mendukung, mendorong segala sistem dapat beroperasi dan memberi inovasi dan solusi baru dari sistem pembayaran berbentuk uang tunai menjadi pembayaran non tunai atau menggunakan kemudahan dari teknologi dan informasi dalam sistem pembayaran (Bambang, 2006).

Sistem pembayaran berbasis elektronik merupakan penerapan dalam peningkatan teknologi pada sistem pembayaran agar aktifitas perbankan lebih cepat, tepat, efisien, akurat, aman dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perbankan. Kehadiran alat pembayaran non tunai bagi perekonomian memberikan manfaat berupa efisiensi dan produktivitas keuangan yang mendorong aktivitas sektor riil dan pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, bila sistem pembayaran mengalami hambatan, kendala, atau mengalami masalah maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan terhambat.

Kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap pembayaran non tunai mungkin disebabkan oleh kurangnya ketersediaan alat untuk bertransaksi menggunakan kartu (non tunai). Karena, sejauh ini yang menyediakan alat untuk melakukan pembayaran non tunai hanya sebatas mini market, super market atau toko-toko besar.

Pembayaran non tunai memiliki banyak manfaat, baik untuk pengguna, penyedia, *merchant* dan negara. Dengan transaksi non tunai dapat menurunkan *shadow economy* sekaligus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Transaksi non tunai juga bisa meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam pengelolaan jumlah uang yang disuplai. Banyaknya uang tunai yang beredar, maraknya kasus pemalsuan uang, serta tingginya biaya operasional yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk mencetak, menyimpan, mendistribusikan dan memusnahkan uang menjadi latar belakang adanya program Indonesia bebas uang tunai yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), merupakan program nyata untuk memberikan edukasi, informasi, sosialisasi kepada masyarakat melalui praktik-praktik penggunaan instrumen non-tunai. Seperti program bantuan sosial yang didistribusikan secara non tunai, *cash management system* dalam dana desa, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penggunaan pembayaran non tunai, perlahan sudah mulai terbentuk suatu komunitas yang menggunakan transaksi non tunai.

Diawali dengan membiasakan menggunakan ATM, kartu debit, kartu kredit, *e-money*, *e-wallet* sampai ke QR (*Quick Responde*) code. Melalui pembayaran non tunai juga dapat meningkatkan inklusi finansial melalui penciptaan ekosistem dalam negeri yang membantu masyarakat bertransaksi, termasuk mereka yang belum *bankable* menjadi *bankable*.

Tabel 1: Jumlah Transaksi E-Money 2020

Periode	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Volume	457,944,919	431,467,683	401,008,518	324,878,568	298,187,348
Nominal	15,872,433	15,178,625	15,036,070	17,552,119	15,033,708

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah transaksi e- money di tahun 2020 mengalami penurunan dari bulan ke bulan, baik dari jumlah volumenya maupun jumlah nominalnya. Hal ini didukung dengan penurunan pertumbuhan transaksi EDC dimana minus 20,7 % dengan nilai Rp. 231 miliar (Kompas, Maret 2020). Padahal seharusnya dengan adanya Covid-19 membuat transaksi non tunai naik, karena dengan transaksi non tunai meminimalisir kontak langsung kepada orang lain.

Kota Langsa merupakan salah satu dari 5 kota madya di Aceh, dan merupakan kota yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Sehingga, penggunaan pembayaran non tunai akan mendukung semakin efisien perekonomian di kota Langsa. Namun, pada kenyataannya masih langka ditemukan terjadinya transaksi ekonomi yang menggunakan sistem

pembayaran non tunai pada pelaku usaha di kota Langsa.

LANDASAN TEORETIS

Sistem pembayaran pada dasarnya adalah hanya sebuah persetujuan mengenai cara mentransfer sejumlah nilai uang antara pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) dalam sebuah transaksi. Mishkin mengungkapkan secara sederhana bahwa sistem pembayaran adalah metode untuk mengatur transaksi dalam perekonomian (Miskin, 2001).

Sistem pembayaran menurut Pohan adalah “suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara (*cross border*)”. Alat pembayaran non tunai dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu alat pembayaran untuk *credit transfer* dan alat pembayaran untuk *debit transfer* (Pohan, 2008)

Alat pembayaran non tunai memberikan manfaat kepada perekonomian menurut Warjiyo (2006), antara lain:

- a. Tingkat kepuasan konsumen yang semakin bertambah dengan berkurangnya biaya transaksi.
- b. Adanya sumber pendapatan bagi penyedia jasa pembayaran non tunai.
- c. Peningkatan kecepatan transaksi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kesejahteraan

Akan tetapi penggunaan sarana pembayaran elektronik tersebut dapat meningkatkan risiko pada perekonomian dan sistem pembayaran, antara lain:

- a. Peningkatan risiko terutama pada instrumen kartu kredit (dan kartu pasca bayar). Hal tersebut dapat menimbulkan risiko sistemik dalam penyelesaian pembayaran antar bank.
- b. Peningkatan risiko teknologi informasi yang dapat menimbulkan kekeliruan maupun kecurangan dalam proses penyelesaian transaksi.

c. Peningkatan risiko instabilitas sistem keuangan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber Data Penelitian adalah data sekunder dan data primer, dimana data primer diperoleh langsung dari pedagang, dan secara langsung dikumpulkan oleh paneliti. Sumber data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumen. Analisis data dengan diklasifikasi, reduksi data dan display data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan di Kota Langsa

Sektor perdagangan meningkat secara signifikan di Kota Langsa. Toko-toko dan restoran-restoran yang bermunculan menjadikannya ideal sebagai persinggahan dari kabupaten-kabupaten tetangganya. Hal ini dapat dilihat dari penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah surat izin usaha yang diterbitkan pemerintah kota Langsa pada tahun 2019 adalah sebanyak 359 surat. Surat izin terbanyak diterbitkan pada kecamatan Langsa Kota yaitu sebanyak 159 surat.

Gambar 1 : Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Langsa 2018



Sumber : BPS Kota Langsa, 2020

Dari gambar 1 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan pedagang di kota Langsa sangat pesat, dapat dilihat setiap tahun mengalami peningkatan jumlah Pedagang. Pedagang Besar paling banyak berada di kecamatan langsa

kota, kemudian kecamatan Langsa Baro, Langsa Barat, dan terakhir di kecamatan Langsa Timur. Kemudian, pedagang menengah dan pedagang kecil paling banyak berada di kecamatan Langsa Baro, selanjutnya Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Lama dan Langsa Timur. Semakin banyak pedagang, maka dibutuhkan tempat pedagang untuk berjualan. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk pedagang berupa pasar, dan lain sebagainya.

Gambar 2 : Jumlah Pasar dan Sarana Menurut Kecamatan di Kota Langsa



Sumber : BPS Kota Langsa, 2020

Pemerintah Kota Langsa menyediakan sarana dan prasarana untuk pedagang berupa pasar, dimana pasar yang disediakan menyebar di setiap kecamatan. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya penumpukan pembeli dan penjual di pusat pasar inti di Kota Langsa. Dari gambar di atas terlihat bahwa jumlah Ruko, los market dan kios yang paling banyak berada di kecamatan langsa kota kemudian, Langsa Baro, Langsa Lama dan Langsa Timur. Selanjutnya, kecamatan Langsa Barat merupakan kecamatan yang hanya memiliki 39 ruko. Dengan meningkatnya pedagang maka meningkat pula penerbitan SIUP seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 : Jumlah Penerbitan SIUP Menurut Bentuk Perusahaan di Kota Langsa, 2019

Kecamatan	PT	CV	Koperasi	PO	Jumlah Total
Langsa Timur	2	4	0	0	6
Langsa Lama	3	6	0	0	9
Langsa Barat	6	10	1	1	18
Langsa Baro	18	27	3	3	51
Langsa Kota	26	22	1	1	50
Jumlah Total	55	69	5	5	134

Sumber :BPS Kota Langsa, 2020

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pedagang yang menerbitkan SIUP paling banyak adalah perusahaan yang berbentuk CV, kemudian PT dan selanjutnya Koperasi dan PO. Dan pedagang yang menerbitkan terbanyak berasal dari kecamatan Langsa Kota, Langsa Baro, Langsa Barat, Langsa Lama, Kemudian Langsa Timur.

Gambaran Umum Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, dimana merupakan subjek penelitian yang berdasarkan pada masalah-masalah yang menjadi objek penelitian. Melalui penelitian ini peneliti mengambil 6 responden yang memiliki usaha di Kota Langsa.

Tabel 3 :Profil Pedagang

No	Jenis Usaha	Pelaku Usaha	Usia
1	Alfariz Baby Shop	Ainul	26 Tahun
2	Rega Bakery	Dara	20 Tahun
3	Kanasha Cafe and Bistro	Darmawan	40 Tahun
4	Aransha Laundry Syariah	Andre	36 Tahun
5	Butik	Fadhillah	32 Tahun
6	Amanah Wash Laundry Syariah	Ria	23 Tahun

Potensi Pembayaran Non Tunai Pada Pedagang Kota Langsa

Kota Langsa merupakan kota madya yang memiliki perkembangan ekonomi pesat karena memiliki letak geografis yang strategis. Sehingga, perkembangan usaha terjadi sangat cepat, apalagi pelaku usaha didukung dengan revolusi 4.0 yang berbasis data. Untuk mempermudah pelanggan, sejak memulai usaha kuliner Kanasha Bistro sudah menyediakan mesin EDC dari Bank Mandiri sebagai sarana pembayaran non tunai. Begitu juga dengan Alfariz babyshop yang menyediakan mesin EDC sebagai salah satu pembayaran non tunai, mesin EDC yang disediakan Alfariz Babyshop dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri. Berbeda dengan Rega Bakery yang menyediakan mesin EDC baru 1 tahun yang lalu dari bank BRI.

Dengan disediakan mesin EDC, beberapa pelanggan selalu menggunakan alat pembayaran non tunai dalam pembayaran baik menggunakan kartu debit/kredit. Menggunakan alat pembayaran non tunai menjadikan pelayanan usaha lebih cepat daripada transaksi tunai, tidak akan ada antrian panjang saat akan membayar yang biasanya membuat pelanggan merasa bosan dalam mengantri.

Penggunaan pembayaran non tunai dalam bertransaksi menjadikan pelanggan lebih efisien karena dapat dilakukan dimanapun dan kapan pun tanpa harus membawa uang tunai. Kemudian, menggunakan pembayaran non tunai juga keamanan lebih terjamin karena tidak harus membawa uang tunai dalam jumlah banyak, yang dapat memberikan kesempatan pencopet atau tindak kriminal lainnya. Dengan menggunakan transaksi non tunai dapat menghindari kehilangan uang karena lupakan tempat penyimpanan atau pun kehilangan karena lainnya.

Selain itu, dengan menggunakan alat pembayaran non tunai juga memudahkan pemilik usaha dalam pencatatan transaksi yang lebih sistematis karena terekam di dalam sistem, mulai dari tanggal dan waktu transaksi, jenis produk, serta jumlah pembayaran dari pelanggan. Transaksi non tunai bagi pengusaha memiliki manfaat besar, beberapa diantaranya seperti mengurangi

penipuan uang palsu dan efisiensi waktu karena tidak perlu menghitung secara manual bahkan kehilangan uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha bahwa beberapa pelanggan telah menggunakan alat pembayaran non tunai, sebagian besar menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Hal ini juga dikarenakan masih sedikit pemilik usaha yang menyediakan pembayaran non tunai selain mesin EDC, seperti OVO, Doku, DANA, dan QRIS (*quick response code indonesia standart*). Faktor pelanggan menggunakan pembayaran non tunai adalah efisien dan aman, dan pelanggan yang menggunakan adalah pelanggan dari kalangan menengah ke atas. Padahal menggunakan alat pembayaran non tunai selain mesin EDC lebih mempercepat transaksi dan biaya yang dibebankan lebih murah, tidak dibutuhkan jaringan mesin EDC yang sering *error*, hanya menggunakan bar-code yang menggunakan jaringan internet.

Gambar 3 : Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Langsa



Jika dilihat gambar 3 di atas, perkembangan pedagang yang mengalami peningkatan yang pesat di Kota Langsa, potensi pembayaran non tunai sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari responden yang diteliti, dari 6 orang responden, yang telah menggunakan pembayaran non tunai 4 orang responden. Alasan pedagang tidak menggunakan pembayaran non tunai :

Pertama, menganggap masih belum perlu. Seperti hasil wawancara dengan pemilik Aransha Laundry syariah :

“masih belum perlu, kan yang cuci baju nggak banyak-banyak kali habisnya, palingan Rp.50.000. karena transaksi konsumennya masih kecil dan enggak banyak, biasa kan pake alat itu yang transaksinya banyak”

Kedua, belum adanya infrastruktur. Pernyataan bu Ria amanah wash laundry

“enggak pake mesin EDC kak, kami masih pake uang tunai, karena belum ada buat. Kemaren itu udah mau buat tapi belum jadi”

Ketiga, Mesin EDC ditarik. Ada dua responden yang tidak menggunakan pembayaran non tunai karena mesin EDC yang ditarik pihak perbankan.

“kami enggak pake lagi mesin itu dek, karena udah ditarik sama Bank. dulu ada pake, tapi ditarik Bank enggak tau kenapa, mungkin karena jarang yang pake itu kalau bayar, mayoritasnya orang beli bayar nya pake uang tunai” imbuhpengelola Narata Swalayan.

“sekarang enggak ada lagi pake kak, karena udah ditarik sama Bank nya, katanya karena mau diganti mesin EDC nya, kan BRI mau jadi Syariah. Jadi sekarang pake uang tunai aja. Lagian yang pake non tunai dikit kak” Papar Dara Kasir Rega Bakery.

Namun, peningkatan jumlah pedagang di kota langsa tidak sejalan dengan peningkatan dalam penggunaan pembayaran non tunai. Di samping itu, penggunaan mesin EDC yang disediakan masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih sedikit masyarakat yang menggunakan pembayaran non tunai.

Hambatan Dalam Menggunakan Pembayaran Non Tunai Pada Pedagang Kota Langsa

Dalam menggunakan pembayaran non tunai terdapat beberapa hambatan yang dialami pedagang, yaitu :

- a. Gangguan jaringan ketika menggunakan mesin EDC. Seringnya terjadi gangguan jaringan membuat pedagang/konsumen enggan menggunakan non tunai.

Seperti yang dikatakan oleh kasir Rega Bakery :

“sering kali gangguan jaringan, error. Jadi g bisa dipake bayar non tunai. Pelanggan jadi cari uang tunai mesti ke ATM untuk tarik uang tunai”.



Begitu juga pernyataan kasir Alfariz babyshop :

“kalau pembeli belanja banyak, biasanya pake ATM bayarnya. Tapi Mesin EDC nya sering error, lama kali kita tunggu jaringannya bagus”

- b. Adanya biaya transaksi tambahan dengan biaya transaksi yang bervariasi pada setiap bank juga merupakan hambatan bagi pelanggan dalam menggunakan alat pembayaran non tunai.

“kadang pelanggan kalau enggak transaksi banyak, dia enggak mau pake non tunai, kan ada potongannya dari bank, apalagi klo kartunya beda bank” tutur Fadhillah

- c. Pengetahuan yang kurang dalam melakukan transaksi digital.

“banyak yang enggak tau kalau bisa bayar pake kartu ATM, jadi mereka kalau kurang uangnya, pergi ke ATM dulu untuk ambil uang” imbuhan Pratiwi Kasir Kanasha Cafe & Bistro

- d. Kurangnya sosialisasi, sehingga jangkauannya masih terbatas. Sosialisasi pihak perbankan hanya pada pihak pedagang saja belum ada ke masyarakat secara umum, padahal masyarakat merupakan pendukung berkembangnya pembayaran non tunai.

“ada ditawari buat pake mesin EDC di toko saya, tapi saya g mau karena masih belum perlu kan” imbuhan Pak Andre.

- e. Pengguna uang elektronik masih didominasi oleh kalangan menengah atas. Sehingga penggunaannya masih tidak terlalu banyak.

“biasanya yang pake ya orang-orang yang banyak duit dan transaksinya banyak, kak. Klau orang biasa dan transaksinya sedikit pake tunai mereka” penjelasan Ainul kasir Alfariz babyshop

- f. Kurangnya kepercayaan masyarakat akan suatu produk baru. Hal ini karena masyarakat masih minim literasi teknologi.

- g. Belum adanya ikut andil pemerintah kota Langsa dalam penerapan pembayaran non tunai.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat di atas yang mendasari tidak berkembangnya peredaran uang elektronik di Kota Langsa.

SIMPULAN

Potensi pembayaran non tunai di Kota Langsa sangat besar, hal ini didukung dengan pedagang yang mengalami peningkatan yang secara pesat setiap tahunnya. Hambatan yang dialami pedagang dalam menjalankan sistem pembayaran non tunai : Gangguan jaringan ketika menggunakan mesin EDC, adanya biaya transaksi tambahan, pengetahuan yang kurang dalam melakukan transaksi digital. penyelenggaraan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat masih sangat kurang, penggunaan uang elektronik masih didominasi oleh kalangan menengah atas, kurangnya kepercayaan masyarakat akan suatu produk baru, belum adanya ikut andil pemerintah kota langsa dalam penerapan pembayaran non tunai.

PUSTAKA ACUAN

- Bambang Pramono DKK. (2006). *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Eko Sujatmiko. 2014. *Kamus IPS*, Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I.
- Mishkin, F. S. 2001. *The Economic of Money Banking, and Financial Markets. Sixth Edition*. Addison Wesley Longman: Columbia University, Columbia.
- Mulyati, Sri Tri Subari, dan Ascarya. 2003. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Seri Kebanksentralan No.8, Bank Indonesia.
- Pohan, Aulia. 2011. *Sistem Pembayaran: Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Untoro, Priyo R. Widodo dan Arifin MS, 2014. *Kajian Penggunaan Instrumen Sistem Pembayaran Sebagai Leading Indicator Makro Ekonomi*, Working Paper Bank Indonesia.
- Warjiyo, P. 2006. *Non-Cash Payments and Monetary Policy Implications in Indonesia*. Didalam: Bank Indonesia. Seminar Internasional Toward Less Cash Society in Indonesia; Jakarta, 17 Mei 2006– 18 Mei 2006. Jakarta: Bank Indonesia.